

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN DESA TANGGUH BENCANA DI DESA AIR LANANG KECAMATAN CURUP SELATAN REJANG LEBONG**

Reza Okta Nurhidaya<sup>(1)</sup> Rosidin<sup>(2)</sup>

<sup>(1)(2)</sup> Prodi Administrasi Publik UM Bengkulu

rokta8681@gmail.com

### **Abstract**

This study aims to: 1) implement village fund policies in the Disaster Tanguh Village in Air Lanang Village, South Curup District; and 2) identify obstacles to implementing village fund policies in Disaster Tanguh Village. The location of this study was Air Lanang Village in the South Curup District. This study employs qualitative descriptive research as its methodology. In this study, there are two types of data sources: primary data and secondary data. A purposive sampling technique, which is a sampling technique based on certain criteria that met the requirements of the research, was used by researchers to select research informants. Observation, interviews, and documentation were the methods used in this study to gather data. By comparing observations with data from interviews, observations, and documentation, triangulation was used in this study to test the validity of the research data. Data extraction, data presentation, and drawing conclusions are the data analysis methods used. The implementation of village fund policies in the Disaster Response Village in Air Lanang Village, Curup Selatan District, as well as communication between the chairman. Disaster Resilient Villages create good communication with the community to avoid misunderstandings. In terms of bureaucracy, it is necessary to build a separate character because it should not cause losses to the community and reduce their income. The norms that are instilled are about social norms of harmony so that the community can live in peace and peace.

Key Words: Implementation, the Village Fund Policy, and Disaster Resilient Villages

### **PENDAHUUAN**

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan Alokasi dasar, dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota (Azwardi, Sukanto, 2014 hal. 29 – 41) Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menujumasyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai (Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, 2015).

BNPB sebagai lembaga yang berwenang dalam penanggulangan bencana membuat kebijakan tentang kegiatan penanggulangan bencana yang bersifat pemberdayaan masyarakat guna mengurangi risiko bencana yakni Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Desa Tangguh Bencana). Program Desa Tangguh Bencana yang merupakan bentuk dari kebijakan publik pada dasarnya memang diperuntukkan bagi daerah. Sesuai dengan namanya yakni desa/kelurahan tangguh bencana maka pelaksanaan maupun pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan. Sedangkan pemerintah dan pemerintah daerah bertugas memfasilitasi program dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan desa/kelurahan. (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014)

Pemerintah daerah Rejang Lebong Provinsi Bengkulu menigmplemetasikan kebijakan dana desa dalam pelaksanaan Desa Tangguh Bencana khususnya pada Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan. Sebagai program yang menangani penanggulangan bencana di tingkat daerah ikut serta dalam penyelenggaraan program Desa Tangguh Bencana di Air Lanang Kecamatan Curup Selatan.

Air Lanang Kecamatan Curup Selatan merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Rejang Lebong. Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan sebagian besar wilayahnya terdiri dari kawasan hutan dan lahan persawahan serta perbukitan dengan kondisi tanah yang didominasi oleh lahan perbukitan dan padat penduduk. Hal ini membuatnya rawan terhadap bencana banjir/longsor, kebakaran hutan dan lahan, banjir bahkan kebakaran pemukiman warga.

Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan memiliki beberapa titik yang rawan terhadap longsor dan banjir hutan dan lahan. Sebagian besar daerah yang rawan bencana kebakaran pemukiman adalah mereka yang memiliki rumah tua (rumah yang terbuat dari papan) sehingga api dengan mudah untuk melalapnya. Serta wilayah perladangan yang rawan lonsor. Pada tahun 2022 terdapat 5 kali kebakaran pemukiman (rumah warga), 3 kali longsor jalan umum, 2 kali longsor peladangan warga dan 2 kali kebanjiran wagra yang berada disekitar kali atau sungai. Sedangkan pada tahun 2023 ini sudah sering terjadi kebakaran rumah sebanyak 3 kali dan 4 kali kebakaran lahan.(WN, Komunikasi Internal, 4 Desember 2023)

Kegiatan program desa tangguh bencana dimulai dari ketika pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Lebih lanjut hadirnya program desa tangguh bencana ini di Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan adalah agar desa mampu untuk beradaptasi dan mengenali ancaman bencana di wilayahnya terkhusus kebakaran hutan dan lahan serta mampu mengorganisir sumber daya yang ada untuk mengurangi risiko bencana tersebut. Program Desa Tangguh Bencana memiliki beberapa komponen di dalamnya. Berdasarkan Perka BNPB No. 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana ada enam komponen yakni legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana (Alhadi, 2019). Jazim Hamidi mengatakan bahwa, legislasi berasal dari kata *legislation* yang berarti perundang-undangan atau pembuatan undang-undang.” (Jazim Hamidi, 2012). Perencanaan dalam arti sederhana adalah proses mempersiapkan hal-hal yang hendak dikerjakan di waktu yang akan datang dalam rangka mencapai sebuah tujuan (Ana Widyastuti, 2021, hal. 2). Amruddin mengatakan bahwa kelembagaan adalah aturan main yang berlaku di masyarakat yang sudah disepakati bersama untuk menjadi sesuatu yang harus dipatuhi agar tercipta keteraturan antar sesama anggota masyarakat (Amruddin, 2021).

Dari pemaparan permasalahan di atas penulis tertarik melakukan penelitian terhadap program desa tangguh bencana yang diterapkan di Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan, dengan judul penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana di Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan Rejang Lebong.

## **Kebijakan**

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak..(Taufiqurokhman, 2014, hal. 3), implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakangroup dimuat dalam isi kebijakan, 2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, 3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, 4)apakah letak sebuah program sudah tepat, 5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan 6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. (Hayat, 2018)

George Edward III dalam buku John Fresly Hutahayan menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

- a. Komunikasi. Tiga hal penting yang perlu dibahas dalam proses kebijakan komunikasi yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Perlu ada keputusanyang telah dibuat dan adanya perintah pelaksanaan serta kejelasan arah komunikasi implementasi kebijakan. Di samping itu perintah implementasiharus konsisten dan jelas.
- b. Sumber daya. Untuk mendukung implementasi diperlukan sumber daya seperti pegawai atau karyawan yang memadai dan memiliki keterampilan yang baik untuk melaksanakan tugas serta wewenang dan fasilitas untuk mendukung penyampaian layanan publik.
- c. Tren atau prilaku. Tren implementasi sangat berpengaruh terhadap keefektifan suatu implementasi kebijakan. Jika pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan dalam hal ini berarti adanya dukungan, maka mereka cenderung akan menerapkan kebijakan yang diinginkan.
- d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

## **Program Desa Tangguh Bencana**

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Salah satu strategi untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pengembangan desa/kelurahan tangguh terhadap bencana dengan upaya Pengurangan Risiko Berbasis Komunitas(PRBBK). Dalam PRBBK, proses pengelolaan risiko bencana melibatkan secara aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya. (RI, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 2007)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa program adalah sebuah rancangan kegiatan yang terencana dan berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan melibatkan berbagai unit.

## **Program Desa Tangguh Bencana**

Mengacu kepada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengertian dari desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sekitarnya, berdasarkan asal usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sedangkan pengertian kelurahan adalah sebuah unit administrasi pemerintah di bawah kecamatan yang berada dalam sebuah kota (RI, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 2004). Kelurahan setara dengan desa yang merupakan

bagian dari kecamatan yang berada di kabupaten, tetapi kelurahan hanya memiliki kewenangan yang terbatas dan tidak memiliki otonom luas seperti yang dimiliki sebuah desa.

Sedangkan desa tangguh bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca bencana.

Dalam destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberlanjutan. (BNPB, Perka BNPB No.1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2016)

Secara umum kegiatan penanggulangan bencana diawali dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Dalam tahap pra bencana kegiatan yang biasa dilakukan meliputi: (Sulistiyawan, 2020)

- 1) Pencegahan (*prevention*), kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan risiko bencana.
- 2) Mitigasi (*mitigation*), serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui mitigasi struktural dan non struktural.
- 3) Kesiapsiagaan (*preparedness*), serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah-langkah yang tepat guna.
- 4) Peringatan Dini, serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Dalam tahap saat bencana meliputi:

- 1) Tanggap Darurat, serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- 2) Bantuan Darurat berupa kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan air bersih.

Dalam tahap pasca bencana meliputi:

- 1) Pemulihan, serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
- 2) Rehabilitasi, perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
- 3) Rekonstruksi, pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat. (Sulistiyawan, 2020)

### **Hambatan Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana**

Dalam konteks penyelenggaraan penanggulangan bencana maka kendala dalam menerapkan program Tangguh Bencana adalah 1) Sumber Daya Manusia (SDM) Belum Memadai Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor ber-gaining position tinggi dalam pelaksanaan suatu program dalam mencapai keberhasilan tujuan yang sudah ditetapkan. Sumber daya manusia

harus memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jika dalam terlaksananya suatu program secara kuantitas sudah terpenuhi, namun apabila dari sisi kualitas dari SDM tersebut masih belum memadai, maka tetap memberikan pengaruh negatif terhadap keberhasilan pencapaian dari suatu program tersebut. 2) Minimnya Sarana dan Prasarana

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di desa Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu: data primer dan sekunder. Peneliti dalam Pemilihan informan penelitian menggunakan metode *purposive sampling*, yakni teknik penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang memenuhi persyaratan dari penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data penelitian dilakukan dengan cara triangulasi. dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan edukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL**

### **Implementasi kebijakan dana desa dalam Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana di Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan**

#### a) Komunikasi

Menurut Edward III dalam (John Fresly Hutahayan, 2010) komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dimaksud dan diterapkan dalam Desa Tangguh bencana di Desa Air Lanang bahwa Komunikasi ketua, hamas dan perangkatat Desa lainnya selalu melakukan transmisi sebagai komunikasi awal kepada masyarakat setempat agar tetap waspada dengan apa kemungkinan yang terjadi. Komunikasi awal merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya.

#### b) Sumber daya

Edward III dalam John Fresly Hutahayan mengemukakan bahwa faktor sumberdaya

mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini bahwa Sumber daya dalam program Desa Tangguh Bencana ini kami terdiri dari 3 bagian yaitu Ketua, humas sekretaris dan anggota ada 3 orang. Dalam keanggotaan tidak ada pengkrekrutan secara khusus hanya saja selain beberapa anggota hanya mengharapkan bantuan dari warga baik oral maupun material.

c) Tren atau Pelaku

Menurut George C Edwards III Tren atau perilaku. Tren implementasi sangat berpengaruh terhadap keefektifan suatu implementasi kebijakan. Jika pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan dalam hal ini berarti adanya dukungan, maka mereka cenderung akan menerapkan kebijakan yang diinginkan. Pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan kosekuensi- konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (output, outcome). (John Fresly Hutahayan, 2010) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tren atau pelaku adalah tidak memerlukan keterampilan khusus melainkan tergantung dengan kegiatan atau pekerjaan kita di saat bencana tersebut. Adapun keterampilan para biasanya ialah dalam menggunakan alat bantu seperti cangkul dan lain sebagainya. Sedangkan dukungan yang diperoleh adalah dari BPBD yang merupakan pemberi dukungan utama demi terlaksananya program ini. Dan program ini pula di biaya oleh Dana Desa. Desa Tangguh Bencana menciptakan komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk menghindari kesalah pahaman. Berdasarkan analisis teori dan temuan di lapangan bahwa Untuk tren atau pelaku yang mana pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan dalam hal ini berarti adanya dukungan, maka mereka cenderung akan menerapkan kebijakan yang diinginkan, dan sepenuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat secara moral. Dan bisa dikatakan cukup relevan dalam segi trend atau pelaku.

d) Birokrasi

Edward III mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi, yaitu: Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*). Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda, Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam hal Birokrasi perlu membangunkan karakteristik tersendiri sebab jangan sampai memberikan kerugian kepada masyarakat dan mengurangi penghasilan mereka. Norma yang ditanamkan adalah tentang norma sosial kerukunan agar masyarakat dapat hidup dengan tentram dan damai. Sedangkan dalam hal struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif hal ini tidak sepenuhnya terlaksana pada program Desa Tangguh Bencana di Desa Air lanang. Sebab tidak memiliki pola-pola hubungan yang terjadi dalam badan eksekutif. Melainkan hanya organisasi saja.

Pengembangan Destana berangkat dari minimnya upaya yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana. Destana bertujuan meningkatkan kemampuan desa dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, melalui pembangunan fisik, penyadaran masyarakat, dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Dalam proses tersebut, semua komponen di dalam desa dilibatkan, termasuk kelompok-kelompok berisiko atau rentan. Pada saat penetapan desa percontohan, rangkaian kegiatan di antaranya diisi dengan edukasi kepada masyarakat

berupa pengetahuan mengenai kesiapan fasilitas, tenaga pendukung, serta prosedur penyelamatan pada saat bencana. Pada saat pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi.

Berdasarkan teori dan temuan di lapangan bahwa Birokrasi yang mana pelaksana sesuai dengan surat SK atau SOP yang sudah diberikan oleh bupati sebagai Desa Tagguh bencana. Namun belum mencakup pembagian kewenangan dalam menanggulangi bencana, belum memiliki hubungan antara unit-unit organisasi lainnya. Dan masih berpaku pada bantuan secara suadaya oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan keaggotaan.

### **Hambatan dalam implemetasi kebijakan**

Menurut Ameila Putrid an Zikri bahwa dalam rangka keberlangsungan pelaksanaan suatu program hingga dapat mencapai keberhasilan yang diinginkan, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan sebagai pendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan terhadap suatu bencana bahwa peranan pemerintah dalam penyediaan dan pemenuhan atas sarana prasarana masih kurang untuk menunjang keberhasilan program nagari tangguh bencana( Amelia Putri Wirasari dan Zikri Alhadi, 2022, Jurnal Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam program Desa Tangguh Bencana ini adalah:

1. Kurangnya pembiayaan. Kurangnya biaya memang menjadi permasalahan dalam setiap program. Salah satu subsistem dalam berjalannya program yang baik adalah subsistem pembiayaan. Pembiayaan sendiri merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya program yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
2. Keterbatasan sarana dan prasana. Dalam melaksanakan program destan ini ada beberapa sarana dan prasarana yang seharusnya di adakan. Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola organisasi atau program adalah mengenai fasilitas organisai. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pelaksanaan Desa Tangguh Bencana, seperti: Gedung, ruangan evakuasi, alat-alat penyelamatan bencana. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses tersebut. Fasilitas tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perlatan penyelamatan atau evakuasi
3. Kurangnya keaggotaan. Minimnya anggota membuat organisasi atau program tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini bisa menjadi penghambat dalam menentukan keberhasilan suatu program. Untuk itu kelengkapan anggota meruakan hak yang harus diperhatikan
4. Tidak adanya penyuluhan atau trening keterampilan dalam tanggap bencana. Sedangkan dalam Desa Tangguh Bencana ini anggota tidak dibekali hal-hal demikian.

Dari teori dan temuan di lapangan bahwa dalam konteks penyelenggaraan penanggulangan bencana maka kendala dalam menerapkan program Tangguh Bencana adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Belum Memadai Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor ber-gaining position tinggi dalam pelaksanaan suatu program dalam mencapai keberhasilan tujuan yang sudah ditetapkan.Sumber daya manusia harus memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.Jika dalam terlaksananya suatu program secara kuantitas sudah terpenuhi, namun apaila dari sisi kualitas dari SDM tersebut masihbelum memadai, maka tetap memberikan pengaruh negatif terhadap keberhasilan pencapaian dari suatu program tersebut. Minimnya Sarana dan Prasarana. Sebenarnya kendala tersebut juga ditemui dalam penelitian ini hanya saja memiliki kendala yang

lebih banyak. Tidak hanya SDM dan sarana prasarana namun dalam hal keterampilan dan pembiayaan yang cukup dalam melaksanakannya.

## **PEMBAHASAN**

### **Komunikaksi**

Menurut Edward III dalam (John Fresly Hutahayan, 2010) komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan public. Perlu disampaikan kepada pelakukebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

1. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publikdisampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yangberkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing- masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
3. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakanyang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dimaksud dan diterapkan dalam Desa Tangguh bencana di Desa Air Lanang bahwa Komunikasi ketua, hamas dan perangkatat Desa lainnya selalu melakukan transmisi sebagai komunikasi awal kepada masyarakat setempat agar tetap waspada dengan apa kemungkinan yang terjadi. Komunikasi awal merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya.

Sebagai komunikasi peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk sirine, kentongan dan lain sebagainya. Namun demikian menyembunyikan sirine hanyalah bagian dari bentuk penyampaian informasi yang perlu dilakukan karena tidak ada cara lain yang lebih cepat untuk mengantarkan informasi ke masyarakat. Harapannya adalah agar masyarakat dapat merespon informasi tersebut dengan cepat dan tepat. Kesigapan dan kecepatan reaksi masyarakat diperlukan karena waktu yang sempit dari saat dikeluarkannya informasi dengan saat (dugaan) datangnya bencana. Kondisi kritis, waktu sempit, bencana besar dan penyelamatan penduduk merupakan faktor-faktor yang membutuhkan peringatan dini. Semakin dini informasi yang disampaikan, semakin longgar waktu bagi penduduk untuk meresponnya.

Keluarnya informasi tentang kondisi bahaya merupakan muara dari suatu alur proses analisis data-data mentah tentang sumber bencana dan sintesis dari berbagai pertimbangan. Ketepatan informasi hanya dapat dicapai apabila kualitas analisis dan sintesis yang menuju pada keluarnya informasi mempunyai ketepatan yang tinggi. Dengan demikian dalam hal ini terdapat dua bagian utama dalam peringatan dini yaitu bagian hulu yang berupa usaha-usaha untuk mengemas data-data menjadi informasi yang tepat dan menjadi hilir yang berupa usaha agar infomasi cepat sampai di masyarakat.



Dengan ini diharapkan akan dapat dikembangkan upaya-upaya yang tepat untuk mencegah atau paling tidak mengurangi terjadinya dampak bencana alam bagi masyarakat. Keterlambatan dalam menangani bencana dapat menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi masyarakat. Dalam siklus manajemen penanggulangan bencana, sistem peringatan dini bencana alam mutlak sangat diperlukan dalam tahap kesiagaan, sistem peringatan dini untuk setiap jenis data, metode pendekatan maupun instrumentasinya. Tujuan akhir dari peringatan dini ini adalah masyarakat dapat tinggal dan beraktivitas dengan aman pada suatu daerah serta tertatanya suatu kawasan.

Selanjutnya, Mengurangi resiko dengan memberikan pembibitan atau penanaman pohon kesigapan dan antisipasi dengan memberikan himbauan untuk menaja lingkungan. Sebelum menanam bibit pohon, warga yang menjadi sasaran kegiatan diberikan penyuluhan terlebih dahulu sebelumnya. Pentingnya melaksanakan penghijauan lingkungan, terlebih di kondisi pemanasan global saat ini. Selain itu, beliau juga menjelaskan bagaimana cara menanam bibit pohon yang baik dengan menyesuaikan kondisi tanah serta lingkungan.

Kegiatan penanaman bibit pohon ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada lingkungan Desa Langlang, terutama pada wilayah Desa Air Lanang. Selain untuk manfaat penghijauan alam, diharapkan setelah bibit pohon tumbuh besar masyarakat dapat memanfaatkan buah-buahan yang dihasilkan oleh setiap pohon. Lebih lanjut, berorientasi pada perencanaan.

Selain itu Desa Tangguh Bencana juga melakukan konsistensi dengan meminta bantuan ABRI dan antisipasi masyarakat. tranmisi pada pemulihan dengan mengupayakan keselamatan pengobatan, tempat tinggal (pengungsian) dan pangan. Selain itu, konsistensi program pra bencana dengan pembuatan siring atau irigasi dan pembersihan sungai yang ada, konsistensi mitigasi bencana dengan meminta masyarkat mematuhi peraturan dari Desa Tangguh Bencana dan patuh pada himbauan BMKG Untuk melakukan konsistensi rehabilitasi dengan melakukan gotong royong bersama ABRI, rekonstruks dengan memberikan bantuan secara langsung.

Berdasarkan analisis temuan hasil penelitian bahwa pihak Desa Tangguh Bencana Air Lanang menerapkan system komunikasi yang lengkap dengan transmisi, konsistensi dan kejelasan. Sehingga bisa dikatakan bahwa komunikasi ini relevan untuk diterapkan pada Desa Tangguh Bencana di Air Lanang.

1. Pada transisi adanya penyampaian informasi awal atau peringatan dini. Dimana pemberian informasi awal dan peringatan dini adalah hal yang terenting dalam transisi pada kominikasi dalam suatu organisasi.
2. Pihak Desa Tangguh Bencana memberikan himbauan. Himbauan ini meruakan baguan dari transisi sehingga masyarakat bisa melakukan pencegahan sedini mungkin. Himbauan ini bisa berupa peringatan untuk meningkatkan kehati-hatian atau kewaspadaan masyarakat
3. Pemberian himbauan ini dilakkan oleh Kades/Kadus dan panitia/etugas Desa Tangguh bencana.
4. Menetapkan peraturan dan larangan untuk membuang sampah sembarangan termasuk membuang smapah di Sungai. Karena hal terbesut berpotensi untuk menimbulkan bencana banjir.
5. Meminta bantuan aparat ketika ada bencana, menyiapkan lokasi pengungsian, makanan bagi pengungsi dan pengobatan gratis bagi korban bencana
6. Dalam Hal kejelasan (*Clarity*) petugas dan aparat desa setempat melakukan penyuluhan secara periodik dan himbauan larangan menebang hutan lindung disekitar mereka dan

melaksanakan penanaman pohon bersama

7. Sebagai Konsistensi memberikan modal usaha kepada korban dan bantuan berupa sembako dan melakukan rekonstruksi dengan memperbaiki bangunan yang rusak, membuat irigasi dan pembersihan sungai

### **Sumber daya**

Edward III dalam John Fresly Hutahayan (2010) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan

#### 1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam John Fresly Hutahayan menyatakan bahwa *“probably the most essential resources in implementing policy is staff.”* *“no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective”* (John Fresly Hutahayan, 2010)

#### 2) Sumber daya Anggaran

Edward III dalam John Fresly Hutahayan menyatakan dalam kesimpulan studinya *“budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”*. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Edward III dalam John Fresly Hutahayan menyatakan bahwa *“newtowns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”*. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. (John Fresly Hutahayan, 2010)

Edward III dalam John Fresly Hutahayan menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. (John Fresly Hutahayan, 2010)

#### 3) Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam John Fresly Hutahayan menyatakan:

*Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed* (John Fresly Hutahayan, 2010)

### **Sumber daya Kewenangan**

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam John Fresly Hutahayan menyatakan bahwa:

Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam John Fresly Hutahayan, menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya (John Fresly Hutahayan, 2010)

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini bahwa Sumber daya dalam program Desa Tangguh Bencana ini kami terdiri dari 3 bagian yaitu Ketua, humas sekretaris dan anggota ada 3 orang. Dalam keanggotaan tidak ada pengkrekrutan secara khusus hanya saja selain beberapa anggota hanya mengharapkan bantuan dari warga baik oral maupun material.

Sebuah desa disebut mempunyai ketangguhan terhadap bencana ketika desa tersebut memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisasikan sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Desa tangguh bencana ini merupakan bentuk dan upaya antisipasi sejumlah kemungkinan terjadinya bencana alam di wilayah Air Lanang

Seharusnya seluruh anggota mendapatkan pelatihan dan arahan-arahan dari BPBD, Destana di Kabupaten Rejang Lebong diharapkan memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana dan mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang terjadi. Tujuan pengembangan desa tersebut adalah untuk melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana.

Melalui Destana, kita juga mengupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya, dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana. Dengan program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana, mulai dari pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, Ormas dan kelompok-kelompok lain yang peduli terhadap bencana.

Berdasarkan teori dan temuan di lapangan bahwa untuk mendukung implementasi diperlukan sumber daya seperti pegawai atau karyawan yang memadai dan memiliki keterampilan yang baik untuk melaksanakan tugas serta wewenang. Namun dalam penelitian ini mereka memiliki keterbatasan pegawai atau petugas dan bahkan tidak memiliki keterampilan yang khusus. Sehingga dengan demikian indikator ini belum terlaksana dengan baik.

### **Tren atau Pelaku**

Menurut George C Edwards III (2010) Tren atau perilaku. Tren implementasi sangat berpengaruh terhadap keefektifan suatu implementasi kebijakan. Jika pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan dalam hal ini berarti adanya dukungan, maka mereka cenderung akan menerapkan kebijakan yang diinginkan. Pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (output, outcome). (John Fresly Hutahayan, 2010)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tren atau perilaku adalah tidak memerlukan keterampilan khusus melainkan tergantung dengan kegiatan atau pekerjaan kita di saat bencana tersebut. Adapun keterampilan para biasanya ialah dalam menggunakan alat bantu seperti cangkul dan lain sebagainya. Sedangkan dukungan yang diperoleh adalah dari BPBD yang

merupakan pemberi dukungan utama demi terlaksananya program ini. Dan program ini pula di biaya oleh Dana Desa. Desa Tangguh Bencana menciptakan komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk menghindari kesalah pahaman.

Untuk mendukung implementasi diperlukan sumber daya seperti pegawai atau karyawan yang memadai dan memiliki keterampilan yang baik untuk melaksanakan tugas serta wewenang. Namun dalam penelitian ini mereka memiliki keterbatasan pegawai atau petugas dan bahkan tidak memiliki keterampilan yang khusus. Sehingga dengan demikian indikator ini belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan analisis teori dan temuan di lapangan bahwa Untuk tren atau pelaku yang mana pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan dalam hal ini berarti adanya dukungan, maka mereka cenderung akan menerapkan kebijakan yang diinginkan, dan sepenuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat secara moral. Dan bisa dikatakan cukup relevan dalam segi trend atau pelaku.

## **Birokrasi**

Edward III mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi, yaitu:

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menanganikeperluan-keperluan publik (public affair).
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalamimplementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks danluas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi denganbegitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendalipenuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam John Fresly Hutahayan) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. (John Fresly Hutahayan, 2010)

Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam John Fresly Hutahayan menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe- tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi(John Fresly Hutahayan, 2010)

Edward III dalam Winarno menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi” struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar ) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif” (Winarno, 2005)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam hal Birokrasi perlu membangkun karateritik tersendiri sebab jangan sampai memberikan kerugian kepada masyarakat dan mengurangi penghasilan mereka. Norma yang ditanamkan adalah tentang norma sosial kerukunan agar masyarakat dapat hidup dengan tentram dan damai. Sedangkan dalam hal struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam

badan-badan eksekutif hal ini tidak sepenuhnya terlaksana pada program Desa Tangguh Bencana di Desa Air lanang. Sebab tidak memiliki pola-pola hubungan yang terjadi dalam badan eksekutif. Melainkan hanya organisasi saja.

Pengembangan Destana berangkat dari minimnya upaya yang dilakukan peMeintah desa dan masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana. Destana bertujuan meningkatkan kemampuan desa dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, melalui pembangunan fisik, penyadaran masyarakat, dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Dalam proses tersebut, semua komponen di dalam desa dilibatkan, termasuk kelompok-kelompok berisiko atau rentan. Pada saat penetapan desa percontohan, rangkaian kegiatan di antaranya diisi dengan edukasi kepada masyarakat berupa pengetahuan mengenai kesiapan fasilitas, tenaga pendukung, serta prosedur penyelamatan pada saat bencana. Pada saat pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi.

Berdasarkan teori dan temuan di lapangan bahwa Birokrasi yang mana pelaksana sesuai dengan surat SK atau SOP yang sudah diberikan oleh bupati sebagai Desa Tagguh bencana. Namun belum mencakup pembagian kewenangan dalam menanggulagi bencana, belum memiliki hubungan antara unit-unit organnisasi lainnya. Dan masih berpaku pada bantuan secara suadaya oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan keaggotaan.

### **Hambatan dalam implementasi kebijakan**

Menurut Ameila Putrid an Zikri bahwa dalam rangka keberlangsungan pelaksanaan suatu program hingga dapat mencapai keberhasilan yang diinginkan, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan sebagai pendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan terhadap suatu bencana bahwa peranan peMeintah dalam penyediaan dan pemenuhan atas sarana prasarana masih kurang untuk menunjang keberhasilan program nagari tangguh bencana( Amelia Putri Wirasari dan Zikri Alhadi, 2022)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam program Desa Tangguh Bencana ini adalah:

1. Kurangnya pembaiyaan. Kurangnya biaya memang menjadi permaslaah dalam setiap program. Salah satu subsistem dalam berjalannya program yang baik adalah subsistem pembiayaan. Pemebiayaan sendiri merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya program yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
2. Keterbatasan sarana dan prasana. Dalam melaksanakan program destan ini ada beberapa sarana dan prasarana yang seharusnya di adakan. Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola organisasi atau program adalah mengenai fasilitas organisai. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pelaksanaan Desa Tangguh Bencana, seperti: Gedung, ruangan evakuasi , alat-alat penyelamatan bencana. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses tersebut. Fasilitas tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perlatan penyelamatan atau evakuasi
3. Kurangnya keangotaan. Minimnya anggota membuat organisasi atau program tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini bisa menjadi penghambat dalam menentukan keberhasilan suatu program. Untuk itu kelengkapan anggota meruakan hak yang harus diperhatikan
4. Tidak adanya penyuluhan atau trening keterampilan dalam tanggap bencana.

Sedangkan dalam Desa Tangguh Bencana ini anggota tidak dibekali hal-hal demikian.

Dari teori dan temuan di lapangan bahwa dalam konteks penyelenggaraan penanggulangan bencana maka kendala dalam menerapkan program Tangguh Bencana adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Belum Memadai Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor memiliki posisi tinggi dalam pelaksanaan suatu program dalam mencapai keberhasilan tujuan yang sudah ditetapkan. Sumber daya manusia harus memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jika dalam terlaksananya suatu program secara kuantitas sudah terpenuhi, namun apabila dari sisi kualitas dari SDM tersebut masih belum memadai, maka tetap memberikan pengaruh negatif terhadap keberhasilan pencapaian dari suatu program tersebut. Minimnya Sarana dan Prasarana. Sebenarnya kendala tersebut juga ditemui dalam penelitian ini hanya saja memiliki kendala yang lebih banyak. Tidak hanya SDM dan sarana prasarana namun dalam hal keterampilan dan pembiayaan yang cukup dalam melaksanakannya.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam hal Komunikasi ketua, hamas dan perangkatat Desa lainnya selalu melakukan tranmisi sebagai komunikasi awal kepada masyarakat setempat agar tetap waspada dengan apa kemungkinan yang terjadi. Mengurangi resiko dengan memberikan pembibitan atau penanaman pohon kesigapan dan antisipasi dengan memberikan himbauan, mengadakan peringatan dini, konsistensi dengan meminta bantuan ABRI dan antisipasi masyarakat. tranmisi pada pemulihan dengan mengupayakan keselamatan pengobatan, tempat tinggal (pengungsian) dan pangan. Selain itu, konsistensi program pra bencana dengan pembuatan siring atau irigasi dan pembersihan sungai yang ada, konsistensi mitigasi bencana dengan meminta masyarakat mematuhi peraturan dari Desa Tangguh Bencana dan patuh pada himbauan BMKG Untuk melakukan konsistensi rehabilitasi dengan melakukan gotong royong bersama ABRI, rekonstruks dengan memberikan bantuan secara langsung Untuk Sumber daya dalam program Desa Tangguh Bencana ini kami terdiri dari 3 bagian yaitu Ketua, humas sekretaris dan anggota ada 3 orang. Dalam keanggotaan tidak ada pengkrekrutan secara khusus hanya saja selain beberapa anggota hanya mengharapkan bantuan dari warga baik oral maupun material Tren atau pelaku adalah tidak memerlukan ketarampilan khusus melainkan tergantung denga kegiatan atau pekerjaan kita di saat bencana tersebut. Adapun keterampilan para biasanya ialah dalam menggunakan alat bantu seperti cangkul dan lain sebagainya. Sedangkan dukungan yang diperoleh adalah dari BPBD yang merupakan pemberi dukungan utama demi terlaksanaannya program ini. Dan program ini pula di biaya oleh Dana Desa. Desa Tangguh Bencana menciptakan komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk menghindari kesalah pahaman. Dalam hal Birokrasi perlu membangkun karateritik tersendiri sebab jangan samapai memberikan kerugian kepada masyarakat dan mengurangi penghasilan mereka. Norma yang ditanamkan adalah tentang norma sosial kerukuanan agar masyarakkat dapat hidup dengan tentram dan damai.

Kendala dalam program Desa Tangguh Bencana ini adalah pertama, kurangnya pembaiyaan. Kurangnya biaya memang menjadi permaslaah dalam setiap program. Kedua, keterbatasan sarana dan prasana. Dalam melaksanakan program destan ini ada beberapa saraa dan prasarana yang seharusnya di adakan. Ketiga, kurangnya keanggotaan. Keempat, tidak adanya penyuluhan atau trening keterampilan dalam tanggap bencana. Sedangkan dalam Desa Tangguh Bencana ini anggota tidak dibekali hal-hal demikian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, R. (2019). Tata Kelola Adminitrasi Keuangan, Dan Pembangunan Desa Tepi Laut Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 2 (2).
- Azwardi, Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No.1 (Juni 2014)
- BNPB. (2014). Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. (2016, Mei 3). Perka BNPB No.1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Retrieved September 29, 2021, from BNPB: <https://bnpb.go.id/berita/perka-bnpb-no-1-2012-tentang-pedoman-umum-desa-kelurahan-tangguh-bencana>
- Buchari, A. (2019). Manajemen Mitigasi Bencana dengan Kelembagaan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut Indonesia. Sembadha,
- Chabib Sholeh, Heru Rochansjah(2015), Pengelolaan Keuangan Desa, Bandung: FOKUSMEDIA,
- Deddy supriadi, Dadang sholihin (2013) otonomi penyelenggaraan pemerintah daerah, Jakarta: gramedia pustaka utama
- Hutahayan, J. F. (2019). Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik: Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yogyakarta: Deepublish.
- Mamik. (2014). Metode Penelitian Kesehatan. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Onsardi, O., Marini, M., & Selvia, E. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 248-261.
- Prihati. (2018). Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Salim. (2019). Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis. Jakarta: Kencana.
- Sayidah, N. (2018). Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Seran, S. (2020). Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial. Yogyakarta: Deepublish.
- Taufiqurokhman, Kebijakan Publik. (Jakarta: FISIP Universitas Maestopo Beragama, 2014)
- Saibani. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta, MediaPustaka.2014)